

**ANALISIS RANGKAP JABATAN WALIKOTA BATAM
DALAM PENYELESAIAN LEGALITAS LAHAN DI
KAMPUNG TUA KOTA BATAM
SKRIPSI**

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



2. Drs. Syaiful M.Si

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena dualisme kewenangan dalam pengelolaan lahan di Kota Batam yang menyebabkan tergerusnya hak-hak masyarakat adat akibat pembangunan daerah industri perkotaan di Batam sehingga menimbulkan permasalahan antara masyarakat dengan pemerintah. Permasalahan ini terjadi pada wilayah perkampungan tua di Kota Batam dimana masyarakat Kampung Tua merupakan masyarakat adat yang tinggal dan bermukim sudah sejak lama di lahan tersebut. Namun akibat pemberian izin lahan yang tidak tepat yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam mengakibatkan status tanah di Kampung Tua masih banyak yang tumpang tindih bahkan sengketa. Sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 pasal 2a ayat 1a tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang menetapkan adanya jabatan *ex-officio* pada Badan Pengusahaan Batam. Dalam membantu menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (1980) yang memetakan implementasi kebijakan melalui dua dimensi penting yakni isi kebijakan dan konteks/lingkungan kebijakan. Isi kebijakan berkaitan dengan pengaruh isi kebijakan yang sangat menentukan hal-hal apa yang harus diimplementasikan dan siapa yang melakukannya. Sedangkan konteks kebijakan berkaitan dengan kondisi sosial politik dalam tubuh birokrasi yang menentukan bagaimana kebijakan itu diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan *ex-Officio* dapat membantu proses percepatan legalitas Kampung Tua dalam aspek koordinasi dan komunikasi yang searah. Namun, rumitnya permasalahan lahan di Batam terkait dengan masalah pengalokasian lahan yang sudah diberikan kepada pihak ke tiga yaitu perusahaan di 37 titik kampung menyulitkan proses percepatan legalitas lahan karena permasalahan ini berhubungan dengan banyak pihak. Apalagi sisi kepatuhan masyarakat belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih beragamnya respon masyarakat terhadap solusi-solusi yang ditawarkan seperti masyarakat masih banyak yang menolak untuk dipindahkan atau direlokasi dari tempat mereka.

Kata Kunci : kebijakan *ex-officio*, legalitas lahan kampung tua, dualisme kewenangan.

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of dualism of authority in land management in Batam City which has eroded the rights of indigenous peoples due to the development of urban industrial areas in Batam, causing problems between the community and the government. This problem occurs in the old village area in Batam City where the Kampung Tua community is an indigenous people who live and have lived on the land for a long time. However, due to the issuance of inappropriate land permits by the Batam Concession Agency, the status of land in Kampung Tua still has many overlaps and even disputes. So that the government issued Government Regulation Number 62 of 2019 article 2a paragraph 1a concerning the Free Trade Zone and Free Harbor of Batam which stipulates that there is an ex-officio position at the Batam Concession Agency. In helping to answer these problems, researchers use the implementation theory of Merilee S. Grindle (1980) which maps policy implementation through two important dimensions, namely policy content and policy context. The content of the policy relates to the influence of the content of the policy which determines what things must be implemented and who does it. While the policy context relates to socio-political conditions and office politics within the bureaucracy that determine how the policy is implemented. This study uses a qualitative approach with the case study method to be able to answer in-depth research questions. The results of this study found that the ex-officio policy could help accelerate the legality process of Kampung Tua in the one-way coordination and communication aspects. However, the complexity of land problems in Batam is related to the problem of allocating land that has been given to third parties, namely companies in 37 village points, making it difficult for the process of accelerating land legality because this problem is related to many parties. Moreover, the compliance side of the community has not been implemented properly because there are still various community responses to the solutions offered, such as many people who refuse to be moved or relocated from their places.

Keywords: ex-officio policy, old village land legality, dualism of authority.